

NASKAH PUBLIKASI
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA



Diajukan oleh :

MICHAEL PAULUS SIREGAR

NPM	: 120510831
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA



Diajukan oleh :

MICHAEL PAULUS SIREGAR

NPM	: 120510831
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Dr. AL. Wisnubroto, SH., M.Hum

Mengesahkan

Dekan



FX. Endro Susilo, SH., LL.M.

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Michael Paulus Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : michaelpaulussiregar@gmail.com

Abstract

Crown witness is often found in criminal offense cases where the cases are inclusions and within them, splitting or a case file division mechanism happens. The position of a crown witness is not explained explicitly in the criminal code procedure (KUHP) and considering that it is an important instrument in criminal justice system enforcement, this paper will review how law position before a crown witness in criminal justice system.

This final project uses normative law study and the data source was obtained from primary law materials viz. related constitutions, secondary law materials namely theories and literature and also tertiary law materials or Kamus Besar Bahasa Indonesia. The standard used to measure the problems in this research project is whether the position of a crown witness is valid in criminal justice system or not. This paper was done by secondary data-based approach and was followed by reviewing the interview results as supporting data.

The result from this paper shows that in a criminal justice system, the position of a crown witness is legal according to the law based on certain principles viz. inclusion characteristic and the lack of evidence in a case which is done by splitting or a case division file mechanism. Based on this result, the author of this paper suggests that to support the implementation of 'fair trial' principles, the exertion of the crown witness needs to be reconsidered because it is against the essence as a suspect in regards to fulfill the basic rights of a suspect and the position of a crown witness should be clearly and explicitly defined in criminal code procedure bills.

Keywords: Criminal Justice System, Crown Witness, Legal Position.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di depan hukum.

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian proses yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹ Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrument pelaksanaan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya diterangkan dalam Pasal 168 huruf b berbunyi: “saudara dari

terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga,” yang membuat ketentuan tentang seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu termasuk orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Selanjutnya dalam perkembangannya, tentang 'saksi mahkota' sebagai alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan 'saksi mahkota' di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan 'saksi mahkota' sebagai alat bukti dalam

¹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140

perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana khususnya dalam kaitannya dengan kedudukan dan perlindungan saksi mahkota, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kedudukan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis membatasi pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

2. METODE

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta

peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber data

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, asas-asas hukum dan pendapat-pendapat hukum dalam literatur.

a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

b) Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

c) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dari pusat bahasa yang dicetak oleh PT. Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2012 serta Kamus Hukum.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitik tolak pada Data Sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen dan melakukan wawancara dengan narasumber. Bahan pustaka dan dokumen serta hasil wawancara yang diteliti berkaitan dengan permasalahan baik yang berkaitan dengan masalah Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia maupun berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta praktek di lapangan.

d. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah aparaturnya penegak hukum sebagai profesional yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparaturnya penegak hukum yaitu, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang berkompeten dan telah berpengalaman menangani kasus dalam perkara pidana yang dalam pembuktiannya menggunakan saksi mahkota di persidangan, dan Penyidik POLDA DIY yang berkompeten serta Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang berkompeten atas data yang ingin diperoleh oleh penulis.

e. Analisis data

Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dalam penulisan ini dianalisa melalui bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dengan mengkaji

sumber kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian proses yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah:²

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

² Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hlm 5.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas.
- c. Bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- d. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

3. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Menurut Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural sincronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial sincronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*).

Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem antara lain:

- a. Susbtansi Merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan.

Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari Sistem Peradilan Pidana.

4. Tahap-tahap dalam Sistem Peradilan Pidana

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR, mengenal 4

(empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana³, dari keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pidana Indonesia dapat dibagi kedalam 4 (empat) tahapam yakni:

- a. Penyelidikan dan Penyidikan, tahapan ini menjadi tanggungjawab Kepolisian.
- b. Penuntutan, tahap ini menjadi tanggungjawab Kejaksaan.
- c. Pemeriksaan disidang dan Putusan, Tahap ini menjadi tanggungjawab Pengadilan.
- d. Pelaksanaan Putusan/Eksekusi, tahap ini menjadi tanggungjawab Pemasyarakatan.

5. Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:⁴

- a. Undang-Undang.
- b. Doktrin atau ajaran.
- c. Yurisprudensi.

Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

perkara pidana, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in time*).
- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La conviction in Raisonee*).
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief wetelijk bewijstheorie*).
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk*).

Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistem pembuktian pada umumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

B. Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Alat Bukti Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

Alat bukti yang sah menurut Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

Alat Bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa.

Selanjutnya Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Alat bukti Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP), kemudian saksi yang pertama didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang menjadi saksi Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP.⁶

2. Pengertian Saksi Mahkota

Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

3. Dasar Hukum Saksi Mahkota

⁵ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252-253

⁶ Marpaung Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Mahkamah Agung diatas diperkuat juga dengan Putusan Mahkamah Agung terdahulu yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung lainnya seperti Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Namun ada Yuresprudensi lain yang menentang pengajuan Saksi Mahkota seperti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

C. Kedudukan Hukum Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Perkara Saksi Mahkota

Berbagai persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perdebatan kontroversial tentang 'saksi mahkota' (*kroongetuide*) dalam *due-process of law* telah lama terjadi. Kendati demikian, pembicaraan perihal topik ini mencuat kembali dan bertambah seru tatkala Kombes Wiliardi Wizard memberikan kesaksian dalam persidangan kasus terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar, pada Tahun 2009.

Kemudian pengajuan Saksi Mahkota juga muncul dalam perkara Tindak Pidana Korupsi seperti kasus suap wisma atlet yang menjerat nama Angelina Sondakh sebagai tersangka sekaligus terdakwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan nama Angelina Sondakh

sebagai tersangka ketika jumat 3 Februari 2012,

2. Pendapat Para Ahli

Menurut M.Yahya Harahap, memberikan pengertian bahwa saksi makota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama dipengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah (di-split).⁷

Menurut M. Sofyan Lubis dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.⁸

Sebagai data pendukung, bahwa Saksi Mahkota (*kroongetuide*) merupakan saksi yang diambil dari seorang terdakwa yang dimana dalam perkara tersebut mengandung unsur penyertaan atau terdapat lebih dari satu orang terdakwa, dengan catatan telah terjadi pemisahan berkas perkara di tahap penyidikan. Dalam wawancara singkat yang dilakukan terhadap narasumber di kepolisian POLDA DIY, Aiptu. Prihardiyanto Penyidik menyebutkan bahwa kedudukan hukum Saksi Mahkota didalam praktik dianggap sah dan perannya Saksi Mahkota sangat membantu menjadi terang suatu kasus dalam perkara-perkara tertentu, dan saya setuju keberadaan Saksis Mahkota, ujar

⁷ M.Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 321

⁸ <http://sofyanlubis.blogspot.sg/2008/07/saksi-mahkota.html> diunduh pada tanggal 21 September 2016, pukul 18.00 WIB.

bapak. Aiptu Prihardyanto Polisi POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹

Penulis juga melakukan wawancara singkat di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H. sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau. Secara yuridis beliau mengatakan kedudukan Hukum Saksi Mahkota dianggap Sah berdasarkan yurisprudensi.¹⁰

Dalam praktik kalimat tersebut yang bersifat fakultatif membuat hakim kebanyakan menerima permohonan jaksa mengajukan Saksi Mahkota, ujar Hakim Zulfikar Siregar S.H., M.H., berdasarkan hasil wawancara beliau juga berpendapat bahwa Saksi Mahkota tidak seharusnya diajukan ke persidangan, karena melihat Pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah cukup mumpuni dalam pembuktian dan membangun keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, demikian hasil wawancara singkat dari salah seorang Hakim Zulfikar Siregar yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman.¹¹

3. Analisis Kasus Hukum Saksi Mahkota

Beberapa kasus hukum pidana dalam jenis perkara tertentu sering dijumpai keberadaan Saksi Mahkota dalam praktiknya, contohnya seperti perkara pidana yang menyeret mantan ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain pada 14 Maret 2009.

Kasus lain juga datang dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

dengan terdakwa Atas Nama Prasetyo Bagus Wastomo Putra, dalam kasus ini ditemukan barang bukti 1 linting ganja, dan 20 biji ganja, terdakwa menjalani tes urine hasilnya dinyatakan positif metamfetamine zat yang terkandung dalam barang terlarang jenis sabhu.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan *Asas non self incrimination* yang dimasukkan sebagai salah satu indikator *fair trial* memberikan konsekuensi yaitu pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga termasuk pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi UU. No. 12 tahun 2005 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan suatu sistem agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dalam KUHAP sendiri pun secara tersirat sebenarnya telah memuat mengenai asas *non self incrimination*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kehadirannya di dalam praktik, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam

⁹ Prihardyanto, Polisi POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara pribadi pada tanggal 27 September 2016.

¹⁰ Nurul Fransisca Damayanti, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 28 september 2016

¹¹ Zulfikar Siregar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara pribadi pada tanggal 26 September 2016.

skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya didalam praktik keberadaan kedudukan hukum Saksi Mahkota dalam tatanan Sistem Peradilan Pidana dianggap Sah secara hukum, penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP.

2. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu membantu meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan yang muncul seputar kehadiran saksi mahkota dalam

proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu: Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi sebagai terdakwa dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik. Sebaiknya dalam RUU KUHAP yang akan datang lebih tegas diperjelas ketentuan mengenai Saksi Mahkota apabila keberadaannya dianggap penting dan berpengaruh besar demi kelancaran proses peradilan pidana untuk pemenuhan dan mencapai rasa keadilan publik.

5. REFERENSI

Buku :

Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke II, Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung 2003.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan*

Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

Marpaung Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan*

Pidana (Criminal Justice Sistem),
Universitas Diponegoro,
Semarang.

Putusan Mahkamah Agung
No. 2437
K/Pid.Sus/2011.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Putusan :

Yurisprudensi Mahkamah
Agung No.1174
K/Pid/1994 tanggal 3
Mei 1995 jo No.1592
K/Pid/1994 tanggal 3
Mei 1995.

Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung
Nomor 1986/K/Pid/1989
tanggal 21 Maret 1990.

Website :

[http://sofyanlubis.blogspot.sg/
2008/07/saksi-
mahkota.html](http://sofyanlubis.blogspot.sg/2008/07/saksi-mahkota.html), diunduh
pada tanggal 21
September 2016, pukul
18.00 WIB